

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Saat ini pemerintah sedang melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola informasi, salah satunya pustakawan, dengan cara memberikan sejumlah perhatian kepada perpustakaan dan diharapkan dapat memacu perkembangan dunia perpustakaan di Indonesia. Hasil dari data statistik Perpustakaan Nasional Republik Indonesia mencatat, terdapat 3621 pustakawan di seluruh wilayah Indonesia pada Januari 2020. (PNRI, 2020)

Pustakawan memiliki tugas dan peranan penting dalam mengelola sumber informasi yang akan terus berkembang dan keberhasilan suatu perpustakaan berasal dari pustakawannya yang memiliki keterampilan dalam melayani masyarakat khususnya pengguna perpustakaan serta pustakawan yang menguasai manajemen informasi. Potensi untuk para pustakawan ini harus dikembangkan agar kebutuhan pemakai tercapai secara optimal.

Pustakawan harus memiliki kemampuan, pengetahuan dalam pengelolaan sumber daya digital perpustakaan dan strategi dalam meningkatkan kompetensi serta profesionalisme diri untuk menghindari terjadinya pergeseran peran, atau disrupsi profesi. Di dalam dunia kerja yang semakin kompetitif, pustakawan dituntut untuk mampu bersaing. Salah satu strategi yang harus dilakukan pustakawan adalah dengan mengikuti program sertifikasi kompetensi pustakawan. (Nashihuddin & Aulianto, 2015) Sertifikasi kompetensi pustakawan menjadi salah satu cara untuk memberi lisensi atau pengakuan dan merupakan mutu jaminan terhadap profesionalisme pustakawan dalam masyarakat modern dan global.

Sertifikasi pustakawan sangat diperlukan, berikut alasannya: (Rodin, 2015)

1. Masyarakat lebih mengakui para pustakawan
2. Memberikan motivasi kepada pustakawan untuk lebih maju
3. Membuat profesi pustakawan lebih diperhatikan oleh pemerintah

4. Timbulnya rasa keadilan bagi pustakawan
5. Dijadikan standar minimal kemampuan pustakawan

Pendapat lainnya, menurut Ana manfaat sertifikasi bagi pustakawan adalah untuk meningkatkan keyakinan klien/organisasi kepada pustakawan bahwa dirinya kompeten dalam melakukan pekerjaannya, meningkatkan rasa percaya diri pustakawan dalam bekerja, terbantunya perencanaan karir yang akan direncanakan pustakawan, tingkat pencapaian dapat diukur, persyaratan regulasi dapat terpenuhi, mendapatkan pengakuan lintas sektor dan lintas negara, serta mempromosikan profesi pustakawan di pasar tenaga kerja. (Ali, 2015)

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah diutarakan maka penting bagi pustakawan untuk memiliki sertifikat kompetensi. Hal ini bertujuan agar pustakawan dapat meningkatkan eksistensi dan profesinya, juga untuk meningkatkan citra perpustakaan yang lebih baik di masyarakat. Dengan sertifikasi, pustakawan mampu melakukan penawaran posisi jabatan atau pekerjaan dengan tingkat kepercayaan yang tinggi, juga mampu berkomunikasi dengan baik bersama rekan seprofesi.

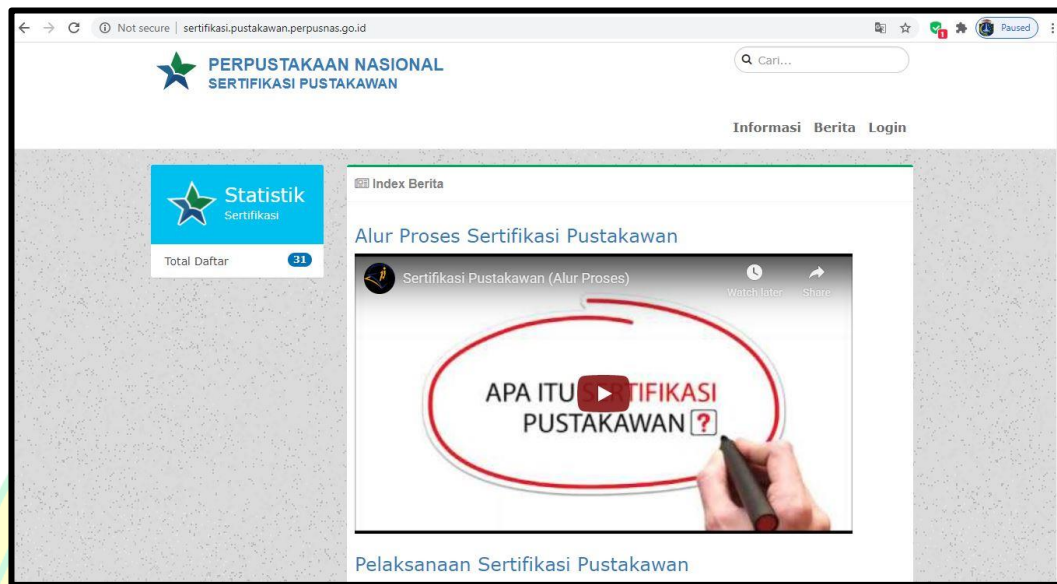
Pada pengamatan dan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sabri Ali (2015) terdapat beberapa penyebab kendala pada proses sertifikasi pustakawan, salah satunya yaitu persiapan Lembaga Sertifikasi Pustakawan (LSP) yang belum dilakukan secara optimal, baik dari aspek sumber daya alam, asesor, hingga Tempat Uji Kompetensi (TUK). Terbatasnya jumlah asesor dan didominasi oleh terpilihnya asesor dari pusat membuat jumlah peserta uji kompetensi dan frekuensi jadwal kegiatan uji kompetensi menjadi terbatas. Asesor adalah orang yang melakukan proses asesmen terhadap pustakawan dan terdiri dari seseorang atau sekelompok orang yang telah mempunyai kompetensi yang relevan serta memenuhi berbagai macam persyaratan. Asesor ini diangkat oleh LSP dalam jangka waktu tertentu dan bertugas meng-ases kompetensi pustakawan yang diuji berdasarkan ketentuan yang berlaku di LSP Pustakawan. (Kurniawaty, 2017)

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) merupakan Lembaga Sertifikasi Profesi Pustakawan di Indonesia yang beralamatkan di Jl. Salemba Raya No. 28A Jakarta Pusat, Kode Pos 10430. Proses yang akan dilalui peserta sertifikasi

saat melakukan pengajuan sertifikasi diawali dengan mengisi data lengkap sesuai dengan yang diminta oleh formulir pengajuan. Kemudian, data akan diverifikasi oleh LSP perpusnas. Data yang telah lolos verifikasi akan diinformasikan kembali melalui surat elektronik atau *e-mail* untuk mengikuti pra-asesmen mandiri dan full-asesmen. Pra-asesmen adalah dilakukannya konfirmasi kesediaan untuk mengikuti asesmen dan konfirmasi pernyataan pada asesmen mandiri. Full-asesmen dilakukannya pengumpulan bukti kompetensi melalui metode tes tertulis, demo, dan wawancara. Setelah itu semua asesmen akan dinilai oleh asesor dan diadakannya sidang pleno untuk menentukan hasil sertifikasi yang telah dilakukan peserta. Hasil ujian kompetensi berupa kompeten atau belum kompeten, informasi disampaikan kepada peserta melalui pesan singkat atau *e-mail*. Apabila peserta dinyatakan kompeten maka sertifikat akan diberikan, namun apabila peserta dinyatakan belum kompeten, peserta harus melakukan pengajuan sertifikasi ulang.

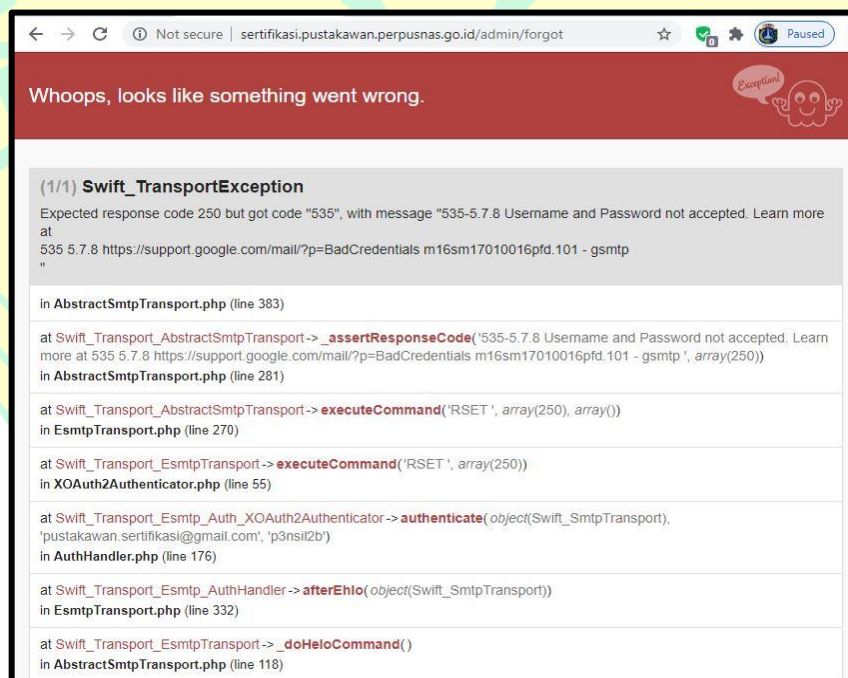
Pendaftaran sertifikasi dibuka oleh Perpustakaan setiap bulan dengan kuota peserta sebanyak 30 peserta dan perbandingan asesor dengan pesertanya sebanyak 1:4. Sehingga dalam satu ruangan akan ada 7 asesor untuk mengawasi jalannya ujian. Data pendaftar sertifikasi tersebut disimpan ke dalam excel dengan pengetikan dan pendataan manual yang dilakukan oleh pustakawan bagian sertifikasi perpustakaan.

Dalam perannya sebagai lembaga sertifikasi profesi pustakawan, perpustakaan sebelumnya telah menyediakan sebuah *website* untuk dilakukannya pengajuan sertifikasi secara online. Berikut adalah contoh tampilan *website* perpustakaan sebelumnya:



**Gambar 1.1:** Tampilan *website* Sertifikasi Pustakawan sebelumnya

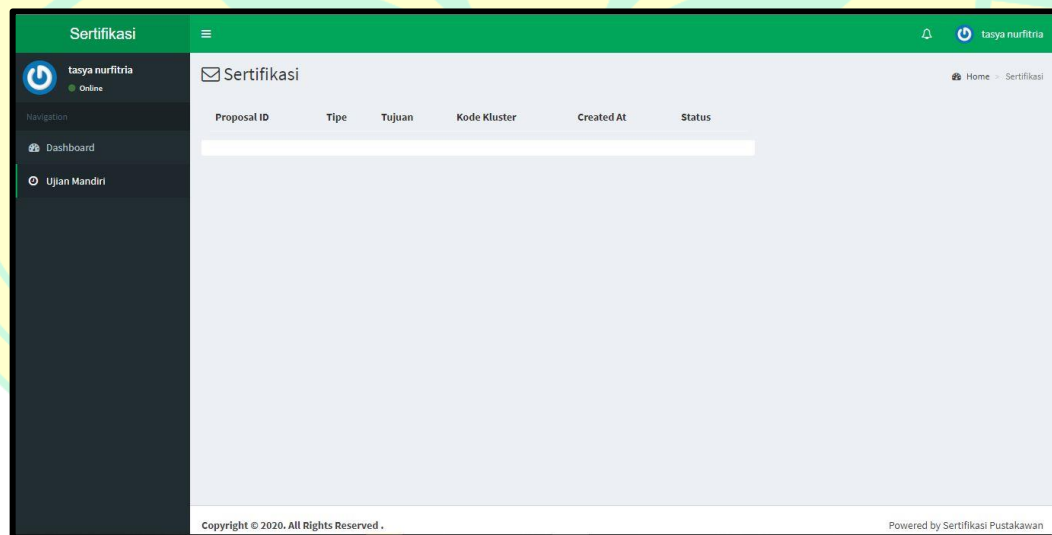
Namun, *website* tersebut mengalami kerusakan sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik, dan *website* tersebut tidak digunakan kembali. Berikut salah satu contoh kerusakan yang terjadi pada saat peserta mengklik tombol lupa kata sandi:



**Gambar 1.2:** Contoh kerusakan pada sistem sebelumnya

Selain itu terjadi beberapa kerusakan pada sistem seperti pada saat peserta mengisi data pribadi pada sistem tersebut, “*Sistem hanya bisa verifikasi e-mail saat peserta melakukan pendaftaran, tetapi untuk melakukan pendaftaran secara online, terjadi error saat pengisian data pribadi. Data yang telah dimasukkan oleh peserta tidak terbaca oleh sistem dan mengakibatkan data peserta tidak tersimpan ke dalam database. Sehingga, pada saat peserta mengisi formulir dan men-submit, error alert selalu muncul, sedangkan data yang dimasukkan itu sudah benar. Ini membuat semua fitur di dalam sistemnya tidak dapat berfungsi dan kami memutuskan untuk menghapus fitur ini.*” Menurut Bapak Husna pada wawancara yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 26 Desember 2019. Dihapuskannya beberapa fitur dan kerusakan yang terjadi serta pernyataan dari pihak perpunas mengenai sistem sebelumnya yang telah terlampir pada transkrip wawancara di lampiran, membuat sistem sebelumnya terbukti tidak dapat digunakan kembali.

Berikut contoh beranda peserta pada sistem sebelumnya dengan fitur pendaftaran yang telah dihapus:



**Gambar 1.3:** Contoh tampilan beranda sistem perpunas sebelumnya

Tidak adanya sistem untuk melakukan sertifikasi ini menjadi kendala yang sangat besar bagi lembaga sertifikasi perpustakaan, sebab tugas utama dari lembaga sertifikasi pustakawan perpustakaan adalah melakukan sertifikasi pada pustakawan di seluruh Indonesia. Tanpa adanya sistem sertifikasi pada lembaga sertifikasi perpustakaan, maka tugas utama lembaga tidak dapat berjalan secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan staff sertifikasi perpustakaan.

Pada tanggal 27 November 2019 penulis melakukan analisis kebutuhan dengan metode wawancara dengan Bapak Rangga selaku perwakilan pegawai sertifikasi Perpustakaan di Gedung Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Salemba Raya. Di dalam wawancara penulis menanyakan masalah yang sering terjadi saat ini dan Bapak Rangga menyatakan, *“Sering, contohnya seperti salah memasukkan data, atau data yang dimasukkan terjadi duplikasi karena kurang teliti pada saat memasukkan data peserta.”*

Pada tanggal 26 Desember 2019, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Husna selaku pegawai pranata komputer sertifikasi Perpustakaan guna untuk melengkapi analisis kebutuhan sebelumnya. Pada saat pertanyaan mengenai apakah diperlukannya sistem untuk pihak sertifikasi perpustakaan, beliau mengatakan *“Sangat diperlukan, untuk memudahkan staff sertifikasi dalam pendataan. Kalau bisa dalam bentuk website.”* Hal ini juga disetujui oleh Bapak Rangga selaku pegawai sertifikasi Perpustakaan pada wawancara di tanggal 27 November 2019, beliau mengatakan *“Sangat diperlukan, kalau bisa dalam bentuk website”*.

Berdasarkan permasalahan dan pernyataan sebelumnya maka penulis merancang sebuah sistem sertifikasi berbasis *website* yang mampu membantu dan memudahkan para pustakawan, asesor dan kerja Lembaga Sertifikasi Pustakawan dalam melakukan administrasi sertifikasi, pengaturan jadwal uji kompetensi, informasi kelulusan ujian serta penerbitan sertifikat apabila pustakawan dinyatakan kompeten secara *realtime*. Fitur-fitur yang memungkinkan untuk diberikan antara lain seperti pendaftaran sertifikasi, asesmen mandiri, jadwal ujian, hasil ujian yang akan dimasukkan oleh asesor, mengunduh sertifikat, dan lain lain.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian yang telah disampaikan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Penyimpanan data administrasi yang dilakukan oleh perpunas masih manual dengan excel dan tidak menggunakan sistem
2. Pemberitahuan informasi asesmen hanya melalui surat elektronik atau telepon, tidak melalui sistem
3. Sistem yang sudah ada sebelumnya tidak dapat digunakan untuk dilakukannya pendaftaran sehingga mengharuskan peserta mendaftar secara manual

## 1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan-batasan masalah pada penelitian ini agar lebih terarah dan sesuai dengan yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Metode pengembangan sistem yang digunakan merupakan model pengembangan perangkat lunak dari metode *System Development Life Cycle (SDLC)* yaitu model *spiral*
2. *Framework* yang digunakan untuk keperluan *back-end* menggunakan *framework* Laravel
3. Sistem menggunakan sampel data dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Sertifikasi Pustakawan
4. Ujian sertifikasi atau uji kompetensi tidak masuk ke dalam sistem

## 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang sebelumnya, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana perancangan dan pengembangan sistem informasi sertifikasi pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia?”

## 1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini yaitu merancang Sistem Informasi Sertifikasi pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan menggunakan *framework* Laravel.

### 1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjadi solusi dalam permasalahan sertifikasi pustakawan yang terdapat pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
2. Sebagai jembatan penghubung antara pustakawan, asesor dan lembaga sertifikasi pustakawan (Perpustakaan Nasional RI) dalam melakukan proses sertifikasi pustakawan
3. Sebagai gambaran dan bahan referensi untuk penelitian dalam membangun sistem sertifikasi pustakawan

